

PENGARUH KINERJA DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENINGKATAN RETRIBUSI TERMINAL KOTA MEDAN

Enda Noviyanti Simorangkir & Oktavianus Frans William Parasian Purba
Universitas Prima Indonesia
endanoviyantisimorangkir@unprimdn.ac.id ; josuapurba789@gmail.com

Abstract

The Department of Transportation is a type of organization that focuses on maximizing productivity so that the desired results can be achieved. The method used in this study is the scribent method, which utilizes quantitative data with a high need for organizing, analyzing, and evaluating all available facts using a technique called time series analysis of product. The North Sumatra Transportation Service revealed that from the following three indicators all of them were quite successful in highlighting new investment data, especially when comparing the capitalization of new investments with future new investments. To increase economic growth. The municipal government of Medan continues to improve terminal development techniques, especially maintenance of terminal facilities. Many issues have arisen in the process of increasing the speed of tax collection during terminal deployment by the North Sumatra Transportation Agency, and many tasks have been approved by the organization.

Keywords: *Department of Transportation, Parking Retribution*

Abstrak: Dinas perhubungan adalah jenis organisasi yang berfokus pada memaksimalkan produktivitas sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode scribent, bahwa memanfaatkan data kuantitatif dengan kebutuhan yang tinggi untuk pengorganisasian, analisis, dan evaluasi semua fakta yang tersedia dengan menggunakan teknik yang disebut deret time series analysis of product. Dinas Perhubungan Sumatera Utara terungkap dari ketiga indikator berikuit ini yang semuanya cukup berhasil menyoroti data investasi baru, terutama ketika membandingkan kapitalisasi investasi baru dengan investasi baru yang akan datang. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah kota Medan terus meningkatkan teknik pembangunan terminal, khususnya pemeliharaan fasilitas terminal. Banyak masalah telah muncul dalam proses peningkatan kecepatan pengerahan pajak selama pengerahan terminal oleh Dinas Perhubungan Sumatera Utara, dan banyak tugas telah disetujui oleh organisasi.

Kata Kunci : Dinas Perhubungan, Retribusi Parkir

PENDAHULUAN

Kota Medan, kota terbesar di Indonesia, terus berupaya untuk mengembangkan wilayah sekitarnya, bukan hanya menanggapi permintaan pejabat pemerintah setempat. Hal ini terlihat dari adanya inisiatif yang diluncurkan dengan tujuan meningkatkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Pemerintah Kota Medan. Sejak Undang-undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan pada tahun 2004 Setiap daerah di setiap daerah di Indonesia harus membiayai pembangunannya sendiri tanpa meminta bantuan dari pemerintah pusat. Karena ada kelas masalah yang berbeda, dari sentralisasi hingga desentralisasi. Tujuannya adalah untuk memajukan pembangunan daerah, khususnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai daerah otonom yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mewujudkan kepentingan dan tanggung jawab masyarakat. Untuk melaksanakan kepentingan masyarakat. Manfaat masyarakat dan tanggung jawab kepada masyarakat.

Pembangunan adalah suatu proses perbaikan terus menerus, dilakukan secara diam-diam untuk mencapai kondisi yang lebih baik diciptakan dan dilaksanakan melalui berbagai langkah di segala bidang kehidupan sehari-hari. Program Pembangunan Nasional dan UUD Pancasila (1945) dilaksanakan dengan tujuan untuk membangun seluruh rakyat Indonesia dan meningkatkan taraf hidupnya baik secara intelektual maupun spiritual. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengambil inisiatif sendiri dan memulai kemandiriannya di luar pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah provinsi memiliki kekuasaan untuk mengamandemen undang-undang lain yang melindungi pemerintah provinsi.

Retribusi Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang sesungguhnya, dinamis, tenteram, dan berani. Retribusi daerah adalah retribusi daerah yang dibayar atau ditawarkan oleh pemerintah kota secara khusus untuk kebutuhan pribadi atau bisnis. Kewenangan memungut, mengurus dan menggunakan alat pembayaran diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota, retribusi daerah harus dipungut dan ditangani secara profesional dan bertanggung jawab. Pengawasan adalah prosuder sistematis untuk merekam prosedur operasi standar selama proyek, menyiapkan sistem informasi, membandingkan prosedur operasi menurut standar yang ditetapkan pada kenyataannya, log atau perangkat

penyimpanan dipertimbangkan dan diukur, dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua bawahan organisasi telah menggunakan metode yang efektif untuk mencapai tujuan mereka. Pengawasan diharuskan membandingkan setiap item yang diluncurkan dengan timeline yang direncanakan. Untuk dapat melakukan perbaikan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan, pengawasan harus dilakukan setiap saat. Dengan pelaksanaan pengawasan, dimungkinkan untuk membalikkan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut.

Pungutan terminal merupakan satu-satunya kantor pembayaran regional untuk layanan bisnis yang memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pemerintah daerah khususnya kota Medan. Biaya regional dibagi menjadi tiga kategori berbeda: biaya layanan umum, biaya layanan bisnis, biaya lisensi. Dinas Perhubungan merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang tetap menentang penerapan retribusi terminal. Dinas Perhubungan merupakan salah satu jenis organisasi yang berfokus pada pemaksimalan produktivitas sehingga hasil yang diinginkan dapat tercapai. Dinas Angkutan Kota Medan memastikan retribusi yang dipungut masuk ke kas daerah sehingga semua jenis denda, penghargaan, atau hukuman dapat dihapuskan. Pada saat terminal penerima pembayaran dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Medan, ada pemantauan tidak langsung dan alokasi hasil. Kedelapan itu disusun dari luar, namun melalui delapan yang disampaikan bawahannya, laporan ini terdiri dari delapan laporan lisan dan tertulis. Dinas Perhubungan Kota Medan harus selalu memenuhi kebutuhan setiap individu yang menggunakan jasanya agar pengawasan efektif dan berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dalam komunikasi. Terminal adalah jalan yang berfungsi untuk mengangkut orang dan/atau barang, serta untuk tujuan lain. Ini juga berfungsi sebagai hub utama untuk transportasi. Wilayah pelayanannya dikelompokkan penumpang terminal menjadi: Terminal penumpang Tipe A, pertama menyediakan jumlah minimum angkutan, untuk angkutan lintas batas, angkutan dalam provinsi, angkutan dalam kota dalam provinsi, angkutan dalam kota dalam provinsi, angkutan perkotaan, angkutan darat, tujuan terminal penumpang tipe B adalah untuk menyediakan angkutan umum, perkotaan, provinsi dan darat dan terminal penumpang tipe C yang berfungsi sebagai hub utama untuk transportasi kota dan darat.

METODE

Jenis penelitian ini kualitatif dengan metode deskriptif dengan pengumpulan data kuantitatif, yang berimplikasi pada kebutuhan menurut mengorganisir, menjabarkan dan mengevaluasi semua fakta yang ada dengan menggunakan teknik analisis korelasi produk langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak implementasi kebijakan retribusi terminal yang bervariasi terhadap kinerja pegawai Dinas Perhubungan Sumatera Utara. Metode atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yang ialah rencana pelaksanaan pendalaman bahwa tidak hanya mencakup analisis hubungan antar variabel penelitian untuk menarik kesimpulan tentang suatu masalah tertentu yang telah diteliti. Dipelajari secara menyeluruh, akurat, dan metodis tetapi juga mencakup pemeriksaan hubungan tersebut. Analisis data regresi digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang signifikansi variabel yang dimaksud. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara.

HASIL

1. Pengertian Kinerja

Pertunjukan tersebut berasal dari kata kerja bahasa Indonesia dan dipadukan dengan pertunjukan bahasa asing. Istilah “hasil kerja” juga dimungkinkan. Bekerja di dalam organisasi berfungsi sebagai barometer tercapai apakah tujuan ditetapkan atau tidak. Kecuali ada sesuatu yang sangat mendesak segala sesuatunya jelas merupakan suatu shalat, para atasan atau manajer sering gagal untuk memahaminya. Sering kali manajer tidak menyadari betapa memburuknya pekerjaan karyawan mereka, yang menyebabkan krisis serius yang dihadapi oleh bisnis dan institusi. Efek samping organik yang sangat buruk dan abaikan tanda peringatan yang memengaruhi kinerja. Anwar Prabu Mangkunegaran esitys (2000:67)

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. Ambar Teguh Sulistiyani Muan (2003:223) Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Malayu Hasibuan (2001:34) Kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. John Whitmore (1997:104) Kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, kinerja adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Robert L. Mathis dan John H. Jackson mengidentifikasi dua faktor yang mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan tugas pekerjaan mereka pada tahun 2001:

- a. Kemampuan anda
- b. Dorongan
- c. Lingkungan yang dibentuk kembali
- d. Awal pekerjaan dan apa yang dilakukan
- e. Komunikasi organisasi

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menegaskan bahwa ketenagakerjaan didefinisikan sebagai kualitas dan kuantitas proyek seseorang atau kelompok tertentu yang ditentukan oleh bakatnya atau dengan melalui proses pembelajaran dan memiliki kemauan untuk berhasil.

3. Manfaat Penelitian Kinerja

Kontribusi hasil-hasil penilaian merupakan suatu yang sangat bermanfaat bagi perencanaan kebijakan organisasi adapun secara terperinci penilaian kinerja bagi organisasi adalah :

- a. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi.
- b. Perbaikan kinerja.
- c. Pengambilan keputusan tentang advertensi, pengalihan, pencopotan, PHK.
- d. Kebutuhan latihan dan pengembangan.
- e. Demi penilaian kritis pegawai.
- f. Memberikan diagnosa sehubungan dengan pegawai kesalahan deasin.

PEMBAHASAN

1. Realisasi Retribusi Terminal

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan para peserta telah mendapatkan bukti bahwa proses identifikasi siapa seharusnya mendapatkan hukuman perlu dipervai. Jadi dapat dikatakan bahwa hal-hal tidak berjalan dengan baik saat ini. Dipahami bahwa

koordinasi antara otoritas transportasi dan pemerintah kota Medan harus diperkuat. Belakangan ternyata perhitungan pihak Perhubungan Sumut lebih jauh kaitannya dengan program retribusi terminal yang baru-baru ini dilaksanakan. Peneliti juga mengakui bahwa meski pelayanan terminal saat ini cukup baik, masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal infrastruktur terminal. Dinas Perhubungan Sumatera Utara ditunjukkan oleh tiga indikator berikut ini yang sangat berhasil dalam menetapkan dasar investasi baru, terutama dalam hal kapasitas investasi kapasitas baru yang sangat akurat jika dibandingkan dengan investasi baru yang akan dilakukan. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa Pemerintah Kota Medan akan selalu dapat menggunakan metode permutasi kapasitas.

Kemudian diharapkan koordinasi antara pemerintah kota dan Dinas Perhubungan Sumut bisa lebih baik lagi terkait peningkatan fasilitas terminal. Peningkatan sumber daya manusia dan kegiatan pembayaran retribusi secara online Dinas Perhubungan Sumatera Utara berhasil menyelesaikan kedua indikator tersebut. Namun, sebagai bagian dari proses percepatan amandemen undang-undang tersebut. Dinas Perhubungan Sumatera Utara melakukan tinjauan tahun 2014 terhadap undang-undang Walikota Medan. Diperkirakan pemerintah kota Medan dan Dinas Perhubungan Sumatera Utara akan menggunakan media untuk mengatasi masalah ini. Peneliti tidak hanya pelaksanaan pengawasan sektor secara manual, tetapi juga pengawasan berbasis teknologi terhadap penyidik resmi dengan keahlian khusus di bidang IT. Dipahami bahwa ada hukuman sebelum melakukannya.

2. Sistem Pemungutan Retribusi Terminal Kota Medan

Peran transportasi memiliki posisi strategis dan prioritas tinggi dalam pembangunan infrastruktur nasional. Oleh karena itu, perencanaan dan pengembangannya harus dilakukan dalam system yang bermasalah Sepenuhnya menerapkan komunikasi dalam dan intermodal secara bebas dan terbuka. Terminal harus ditingkatkan dan di pasang dilokasi yang relevan. Perda Kota Medan 2 Tahun 2014 tentang Perkembangan Retribusi Daerah di Bidang Transportasi. Biaya retribusi terminal dasar untuk penumpang yang tiba di terminal dan mereka yang menggunakan fasilitas bus untuk menetbitkan tiket adalah biaya yang tercantum di bawah ini.. Struktur dan keumuman tarif biaya akhir ditetapkan sebagai berikut:

- a. Biaya layanan terminal
 - 1) Angkutan perkotaan (MPU) Rp. 1.000 perkali pemakaian.
 - 2) Bus kota masuk kedua kalinya seharga Rp. 1.000.00
 - 3) Lalulintas Kota/mobil penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP)Rp.

1.000.0

- 4) Bus AKDP Rp. 2.500.00 per orang pada saat keberangkatan
- 5) Bus antar kota antar provinsi (AKAP) Rp. 5.000.00 pada saat boarding
- 6) Angkutan barang roda empat (4) Rp. 2.000.00 pada saat kedatangan
- 7) Angkutan barang roda enam (6) Rp. 3.000.00 saat diterima
- 8) Angkutan barang diatas roda enam (6) Rp. 5.000.00 saat diterima

3. Upaya Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Retribusi Terminal Kota Medan

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi akhir Perhubungan Sumut, banyak kendala yang dihadapi untuk percepatan pemungutan pajak tersebut. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dishub Sumut, dengan Dishub Sumut memberikan izin khusus untuk menutup Terminal Medan. Retribusi terminal dipungut oleh petugas tol yang berdiri di depan pintu keluar dan masuk terminal dan menderek semua kendaraan yang tiba di terminal sesuai SOP (Standard Operating Procedure) untuk pembatalan biaya terminal. Dinas Perhubungan Sumut telah meningkatkan sarana dan prasarannya. Biaya terminal yang menarik untuk memuat. Penjualan tiket bus malam, loket tambahan. Peningkatan sarana dan prasarana dapat berupa perbaikan lingkungan jalan terminal. Perbaikan tempat parkir terminal.

KESIMPULAN

Beralaskan buatan kajian melalui iformasi yang disajikan pada bagian-bagian sebelumnya terdapat bukti bahwa strategi pembagian retribusi di terminal merupakan pembayaran kepada pemerintah oleh subjek karena adanya hibah khusus yang pemerintah menawarkan kepada subjek dengan cara yang diskriminatif. Dalam melaksanakan strategi retribusi terminalnya, Pemerintah Sumatera Utara tidak menyimpang dari system atau cara pemberian retribusi itu sendiri sebagai sarana pelaksanaan tugas yang bersangkutan. Pemerintah kota Medan terus berupaya meningkatkan praktek pembangunan terminal untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, khususnya perbaikan fasilitas terminal. Banyak masalah muncul dalam proses peningkatan kecepatan pemasangan pajak selama pemasangan terminal oleh Dinas Perhubungan Sumatera Utara, tetaoi banyak tugas telah diselesaikan oleh organisasi tersebut, karena Dinas Perhubungan Sumatera Utara telah menyediakan izin terutama untuk fasilitas terminal. Terminal tol diawaki oleh pengelola Jalan tol di depan pintu

keluar dan pintu masuk terakhir yang menjaga setiap kendaraan yang memasuki terminal SOP (standart operating procedure) penarikan terminal retribusi. Dinas Perhubungan Sumatera Utara mampu meningkatkan saran dan prasarana. Keberangkatan bus karcis melayu dan penambahan loket dan praktek sarana dan prasarana dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 201*. ANDI.
- Handoko, T. H. 1984. *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. BPFE.
- Rinata, A. dan I. 2016. *Intensifikasi terminal bus Amplas oleh Dinas Perhubungan Kota Medan*.
- Suandy. 2011. *Perencanaan pajak* (edisi 5) Salemba Empat.
- Yeni. 2002. *Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di indonesia*.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *prosedur penelitian*, Rineka Cipta.
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.(n.d)
- Syarifuddinm. 2010. *pengelolaan retribusi terminal di Kabupaten Banteng*, Universitas Hasanuddin.